

**PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA (STUDI KASUS PADA MATA PELAJARAN PPKN
UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN HASIL BELAJAR SISWA DI SMA
MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG)**

Dian Maulina¹, Meta Melyani², Putri Pauziah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹dianmaulina_uin@radenfatah.ac.id, ²metameliyani@gmail.com,

³putripauziah10@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the Independent Curriculum requires effective school leadership support and the role of teachers who are able to create student-centered learning. This study aims to analyze the role of the principal in the policy and implementation of the Independent Curriculum in the Pancasila and Citizenship Education (PPKn) subject to support student learning outcomes at SMA Muhammadiyah 2 Palembang. This research employed a qualitative method, focusing on a case study approach. Data was gathered using observation, interviews, and written records. The people who provided information for the research were the school principal and the PPKn teachers, as they were directly involved in carrying out the Independent Curriculum. The results showed that the principal plays a role as a director, supervisor, evaluator, and policymaker in the implementation of the education program. Curriculum policies are formulated based on educational report cards, then developed through the preparation of school work plans involving the vice principal and teachers. The implementation of the Independent Curriculum is carried out through socialization activities, workshops, supervision, evaluation, training, and technical guidance in the form of Workshops on Learning Digitalization, School-Based Management, and Academic Information Systems. In Civics (PPKn), teachers act as facilitators by implementing discussion methods, case studies, and project-based learning. Student learning outcomes demonstrate good achievement, with average scores above the Minimum Completion Criteria. This study concludes that the principal's collaborative and participatory leadership supports the successful implementation of the Independent Curriculum and contributes to improved student learning outcomes in Civics (PPKn).

Keywords: *principal, independent curriculum, ppkn, learning outcomes*

ABSTRAK

Penerapan Kurikulum Merdeka menuntut adanya dukungan kepemimpinan sekolah yang efektif serta peran guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala sekolah dalam kebijakan dan implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk mendukung pencapaian hasil belajar siswa di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan catatan tertulis. Orang-orang yang memberikan informasi untuk penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru PPKn,

karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan Kurikulum Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan sebagai pengarah, pengawas, evaluator, dan pengambil kebijakan dalam pelaksanaan program pendidikan. Kebijakan kurikulum disusun berdasarkan rapor pendidikan, kemudian dikembangkan melalui penyusunan rencana kerja sekolah yang melibatkan wakil kepala sekolah dan guru. Implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, workshop, supervisi, evaluasi, pelatihan, serta bimbingan teknis berupa Workshop Digitalisasi Pembelajaran, Manajemen Berbasis Sekolah, dan Sistem Informasi Akademik. Pada mata pelajaran PPKn, guru berperan sebagai fasilitator dengan menerapkan metode diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Hasil belajar siswa menunjukkan capaian yang baik dengan rata-rata nilai berada di atas Kriteria Ketuntasan Minimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang kolaboratif dan partisipatif mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka serta berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn

Kata Kunci: Kepala Sekolah, Kurikulum Merdeka, PPKn, Hasil Belajar

A. Pendahuluan

Kurikulum Merdeka adalah salah satu kebijakan pendidikan yang diterapkan agar sekolah memiliki kebebasan lebih dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan setiap siswanya. Kurikulum ini fokus pada pembelajaran yang mengutamakan siswa, membangun kemampuan yang diperlukan, serta memperkuat nilai-nilai karakter berdasarkan Profil Pelajar Pancasila. Dalam penerapannya, keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada kemampuan guru dalam mengajar, tetapi juga dipengaruhi oleh peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, mengarahkan program sekolah, serta memantau

pelaksanaan pembelajaran. Menurut Mulyasa (2021), kepala sekolah memiliki peran sebagai pendidik, manajer, administrator, pengawas, pemimpin, inovator, dan pemicu semangat yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Salah satu mata pelajaran yang turut menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, sikap, dan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Dalam Kurikulum Merdeka, guru mata pelajaran PPKn diharuskan menggunakan metode pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa, terkait dengan

konteks nyata, dan berpusat pada kebutuhan siswa, seperti melalui diskusi, studi kasus, dan proyek pembelajaran. Sebab itu, diperlukan bantuan kebijakan dan pengawasan dari kepala sekolah agar Kurikulum Merdeka dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.

SMA Muhammadiyah 2 Palembang merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, kepala sekolah berperan aktif dalam menyusun kebijakan pendidikan, melaksanakan supervisi, serta memberikan berbagai program pengembangan kompetensi guru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan kepala sekolah, implementasi Kurikulum Merdeka, pembelajaran PPKn, dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala sekolah dalam kebijakan dan implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn untuk mendukung pencapaian hasil belajar siswa di SMA Muhammadiyah 2 Palembang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dengan baik peran kepala sekolah dalam membuat kebijakan dan menerapkannya Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), agar dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam makna suatu fenomena dengan mengacu pada pengalaman serta sudut pandang dari para partisipan yang secara langsung terlibat didalamnya..

Penelitian dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah dan guru PPKn yang memiliki keterlibatan langsung dalam penyusunan kebijakan sekolah serta pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan proses pembelajaran PPKn di sekolah. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada kepala sekolah dan guru guna memperoleh informasi mengenai kebijakan kurikulum, strategi implementasi Kurikulum Merdeka, serta upaya peningkatan hasil belajar siswa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa program kerja sekolah, rapor pendidikan, perangkat pembelajaran, hasil supervisi, dan data hasil belajar siswa.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan data yang digunakan valid dan dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan dua metode triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Metode ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari beberapa sumber data seperti pengamatan, wawancara, dan

dokumentasi. Dengan cara ini, data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Kepala Sekolah

Kepala sekolah mempunyai peran yang sangatlah penting dalam pelaksanaan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Palembang, khususnya dalam kebijakan dan implementasi Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah tidak hanya bertugas sebagai pemimpin administratif, tetapi juga bertindak sebagai penunjuk arah, pengawas, penilai, dan pembuat keputusan dalam menjalankan program pendidikan di sekolah. Menurut Mulyasa (2021), kepala sekolah adalah seorang pemimpin pendidikan yang memiliki peran sebagai pendidik, manajer, administrator, pembimbing, pemimpin, inovator, dan pendorong semangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sebab itu, keberhasilan sebuah program pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam mengatur, menghubungkan, dan memandu semua bagian sekolah

agar tujuan belajar bisa tercapai dengan baik.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, kepala sekolah melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap guru, wakil kepala sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya. Pengawasan itu dilakukan agar semua program yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang sudah ditentukan. Selain itu, kepala sekolah juga melaksanakan evaluasi secara berkala, baik setiap semester maupun triwulan, guna mengidentifikasi berbagai kendala serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pendidikan.



Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah menyampaikan bahwa: “Kalau saya, peran saya adalah sebagai pengawas. Selain sebagai pengawas, saya juga berperan sebagai pengendali, evaluator, dan pihak yang terlibat

dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Peran tersebut mencakup memberikan arahan, melakukan pengendalian, serta pendampingan dalam pelaksanaan program di sekolah.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bisa dipahami bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang luas dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Peran sebagai pengawas menunjukkan bahwa kepala sekolah bertugas mengawasi pelaksanaan program pendidikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, peran sebagai pengendali dan evaluator menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak hanya mengawasi, tetapi juga melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Dengan demikian, kepala sekolah menjadi tokoh sentral yang menentukan keberhasilan kebijakan dan implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Muhammadiyah 2 Palembang.

Kebijakan Kurikulum

Kebijakan kurikulum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena

berperan sebagai dasar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program belajar mengajar di sekolah. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan perkembangan peserta didik. Kebijakan yang tepat akan membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan serta memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan berjalan secara efektif dan terarah. Menurut Mulyasa (2021), sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan, kepala sekolah bertugas untuk menciptakan kebijakan yang membantu meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan kemampuan semua anggota sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Muhammadiyah 2 Palembang, penyusunan kebijakan kurikulum diawali dengan analisis rapor pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di sekolah. Hasil identifikasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun program pengembangan sekolah, termasuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan

Rencana Kerja Menengah (RKM). Proses penyusunan kebijakan dilakukan secara bersama-sama



melalui rapat dan diskusi yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru sehingga keputusan yang diambil dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah menyampaikan bahwa: “Yang pertama, kita melihat rapor pendidikan. Jadi, kalau di sekolah, acuannya adalah rapor pendidikan. Dari situ kemudian kita mulai mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan di sekolah. Setelah itu sekolah menyusun RKT dan RKM bersama wakil kepala sekolah serta guru melalui rapat dan diskusi.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan kurikulum di SMA Muhammadiyah 2 Palembang disusun berdasarkan data dan kebutuhan nyata sekolah. Selain itu, keterlibatan guru dalam proses penyusunan

kebijakan menunjukkan adanya pola kepemimpinan yang partisipatif. Melalui kebijakan yang dirancang secara kolaboratif, sekolah dapat menciptakan program pendidikan yang lebih terarah dan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn agar hasil belajar siswa meningkat.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka adalah proses menerapkan kebijakan pendidikan yang bertujuan membuat pembelajaran lebih fleksibel, berpusat pada siswa, serta memberi kesempatan kepada guru untuk mengembangkan metode mengajar yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa (Rahayu et al., 2022). Kebiasaan sekolah yang siap, kemampuan guru, serta bantuan kepala sekolah dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program pendidikan sangat memengaruhi keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka. Sebab itu, diperlukan berbagai upaya yang disusun dengan rapi agar tujuan Kurikulum Merdeka bisa tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Muhammadiyah 2 Palembang,

implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi, workshop, supervisi, evaluasi, pelatihan, serta bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala (Sufyadi et al., 2022). Selain itu, sekolah juga memberikan bantuan kepada guru agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam proses belajar mengajar.



Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah menyampaikan bahwa: “Yang pertama adalah sosialisasi melalui rapat-rapat. Pada awal tahun biasanya diadakan workshop, kemudian dibuat rencana tindak lanjut (RTL). Setelah itu dilakukan supervisi setiap tiga bulan sekali untuk melihat pelaksanaan Kurikulum Merdeka oleh guru. Pada tahap akhir dilakukan evaluasi, dan apabila masih terdapat kekurangan

maka akan diberikan pelatihan kembali.”

Selain kegiatan tersebut, sekolah juga melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) yang terdiri atas Workshop Digitalisasi Pembelajaran, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Sistem Informasi Akademik. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk melatih tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar lebih mahir menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar serta lebih terampil dalam mengelola berbagai urusan administrasi sekolah secara lebih baik dan lebih cepat. Melalui berbagai program tersebut, implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Muhammadiyah 2 Palembang dapat berjalan lebih terarah dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk pada mata pelajaran PPKn.

Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Dalam penerapan Kurikulum Merdeka, guru berperan penting sebagai fasilitator pembelajaran yang mendukung siswa dalam membangun pengetahuan, kemampuan, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum Merdeka

menuntut guru untuk tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dalam proses pembelajaran, melainkan berperan sebagai pendamping yang mendorong siswa untuk belajar secara aktif, mandiri, dan kritis (Sufyadi et al., 2022). Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), peran guru semakin penting karena pembelajaran tidak hanya tentang menguasai materi, tetapi juga membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan siswa.



Berdasarkan hasil penelitian di SMA Muhammadiyah 2 Palembang, guru PPKn sudah menerapkan beberapa metode belajar yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Pembelajaran dilakukan dengan cara melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi kelompok, menganalisis kasus-kasus pembelajaran, menyelesaikan masalah, serta melakukan pembelajaran yang berbasis pada proyek. Melalui

kegiatan tersebut, siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, berpikir kritis, dan menggabungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara, guru PPKn menyampaikan bahwa: "Dalam pembelajaran PPKn ini, saya bertugas sebagai fasilitator dengan mengajak para siswa untuk lebih aktif berdiskusi, menonton video-video, dan menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek."

Selain itu, guru juga menjelaskan: "Jadi bukan hanya saya yang berceramah, tetapi peserta didik lebih banyak mencari masalah dan mengaitkannya dengan materi pembelajaran."

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa guru PPKn telah menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Guru memberikan kesempatan lebih besar bagi siswa untuk terlibat dalam proses belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Dengan demikian, peran guru sebagai fasilitator tidak hanya membantu siswa memahami materi PPKn, tetapi juga mendorong terbentuknya kemampuan berpikir kritis,

keterampilan berkomunikasi, dan sikap aktif yang mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Muhammadiyah 2 Palembang.

Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran PPKn

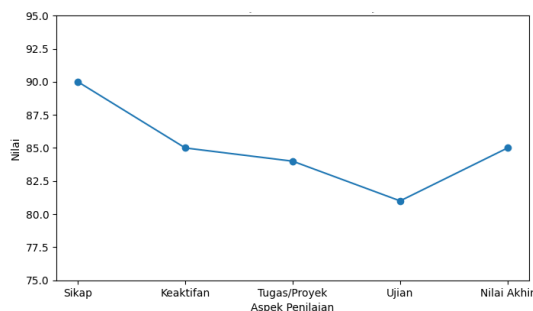
Hasil belajar adalah cara untuk mengetahui sejauh mana siswa berhasil dalam belajar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka, penilaian terhadap hasil belajar tidak hanya mengevaluasi kemampuan berpikir, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan keterampilan motorik (Rahmadayati & Hartoyo, 2022). Oleh karena itu, penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk melihat perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan murid. Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), mengevaluasi hasil belajar siswa sangat penting karena pelajaran ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang kewarganegaraan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan sikap siswa dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Muhammadiyah 2 Palembang,

hasil belajar murid di mata pelajaran PPKn menunjukkan capaian yang baik. Data hasil belajar menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa berada di atas batas ketuntasan yang telah ditetapkan sekolah. Nilai rata-rata kelas X dan XI mencapai 85, sedangkan kelas XII mencapai 86 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut :

Table 1 Nilai Rata-Rata Siswa Kelas X, XI, dan XII Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Muhammadiyah 2 Palembang

Kelas	Rata ² Nilai	KKM	Keterangan
X	85	75	Tuntas
XII	85	75	Tuntas
XII	86	75	Tuntas



Grafik 1 Nilai Rata-Rata Siswa Mata Pelajaran PPKn

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan siswa sudah bisa memenuhi kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran

PPKn.



Berdasarkan hasil wawancara, guru PPKn menyampaikan bahwa: “Saya menilai lebih ke karakter, seperti sopan santun dan sikap siswa terhadap teman dan guru.” Selain itu, guru juga menjelaskan: “Untuk kognitif saya menilai dengan asesmen seperti tanya jawab atau ujian.” Selanjutnya guru menambahkan: “Untuk keaktifan saya bisa nilai dari siswa yang sering memberi pendapat atau siswa yang sering bertanya.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian hasil belajar dalam pembelajaran PPKn dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif diukur melalui asesmen dan evaluasi pembelajaran, aspek afektif dinilai melalui sikap dan karakter siswa, sedangkan aspek psikomotorik terlihat dari keaktifan siswa dalam berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan

pendapat. Hasil belajar yang membaik menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka dalam pelajaran PPKn sudah berjalan cukup baik. Selain dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang diterapkan guru, pencapaian tersebut juga didukung oleh kebijakan dan pendampingan kepala sekolah yang secara berkelanjutan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di SMA Muhammadiyah 2 Palembang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 Palembang, bisa disimpulkan bahwa kepala sekolah memegang peran penting dalam membuat kebijakan dan menerapkan Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah bertugas sebagai pemimpin, pengawas, penilai, pengatur, dan pembuat keputusan yang bertanggung jawab untuk memastikan semua program pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan kebijakan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada rapor pendidikan yang menjadi dasar untuk mengenali kebutuhan sekolah. Selanjutnya, kebijakan tersebut dikembangkan

melalui penyusunan program kerja yang melibatkan wakil kepala sekolah dan guru sehingga tercipta pengelolaan pendidikan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif.

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Muhammadiyah 2 Palembang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, workshop, supervisi, evaluasi, pelatihan, serta bimbingan teknis yang meliputi Workshop Digitalisasi Pembelajaran, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Sistem Informasi Akademik. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dan staf pendidik agar bisa mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Dalam penerapannya, guru PPKn berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk belajar secara aktif dengan melakukan diskusi, menganalisis studi kasus, dan melakukan pembelajaran berbasis proyek.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn termasuk dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata kelas X dan XI mencapai 85, sedangkan kelas XII mencapai 86. Penilaian dilakukan secara

menyeluruh yang mencakup tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah yang didukung oleh implementasi Kurikulum Merdeka serta peran aktif guru PPKn memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa di SMA Muhammadiyah 2 Palembang.

Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret Kurikulum Merdeka sebagai wujud Merdeka Belajar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174-7182.

Sufyadi, S., et al, (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mulyasa, E. (2021). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Jakarta: Bumi Aksara.